

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali

sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah,
- b. Hasil retribusi daerah,
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2) Dana Perimbangan; dan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004)

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah.

Dengan kata lain, sektor pariwisata memberikan peranan yang sangat besar dan membantu dalam percepatan pembangunan di daerah. Kabupaten Dairi mempunyai objek wisata yang masih asri dan masih alami dalam hal ini alami asli dari alamserta tersebar di daerah ini yang sangat berpeluang dan merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam meningkatkan

dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Banyak objek wisata yang berpotensi layak dikunjungi dan juga masih dalam tahap pengembangan. Daerah kabupaten dairi juga memiliki kondisi geografis yang sangat potensial dimana daerah ini mempunyai potensi alam yang sangat strategis yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain. Potensi alam ini dapat terlihat pada Taman Wisata Iman Sitingo dan dan berbagai panorama alam seperti pohon pinus disepanjang jalan wisata yang mengelilinginya dan sekaligus dapat dinikmati secara bersamaan dari satu tempat. Berikut adalah banyaknya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Dairi pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Total
2005	16.267	2.532	18.799
2006	15.861	4.394	20.210
2007	19.192	5.739	24.931
2008	19.575	5.865	25.431
2009	16.217	12.068	28.285
2010	17.242	11.622	28.864
2011	26.258	7.639	33.897
2012	73.539	32.278	105.871
2013	87.257	22.207	109.464
2014	97.366	20.849	118.215

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Dairi semakin tahun cenderung semakin meningkat, hal ini didukung karena sudah hampir 5 tahun Taman Wisata Iman Sitingo Kabupatendairi menerapkan visi menjadikabupaten pariwisata pada tahun yang akan datang, sehingga tentunya semakin mempengaruhi peningkatan jumlah retribusi daerah Taman Wisata Iman Sitingo Kabupaten dairi khususnya melalui retribusi tempat rekreasi dan hiburan umum. Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan, fasilitas

rekreasi, tempat dan atraksi wisata yang merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Dairi yang terdapat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Tahun	Rata-rata Angkasa Raya dan Berampu Indah (%)
2005	6,52
2006	7,06
2007	7,40
2008	8,14
2009	8,10
2010	12,42
2011	16,93
2012	14,81
2013	13,37
2014	15,47

Sumber :BPS-Laporan Bulanan Hotel dan Akomodasi Lainnya

Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Dalam dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2013sampai 2014 tingkat penghunian kamar hotel di Taman Wisata Iman Sitinjo di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan.

1.1.1 Retribusi dari Taman Wisata Iman Sitinjo

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. dan dimana adanya peraturan daerah yang mendasari pemungutan yang dilakukan di objek wisata TWI yaitu Peraturan yang mengatur tentang Kepariwisataan di Dairi diatur dalam Peraturan Daerah, yaitu Perda No. 22 Tahun 2001 tentang

Pariwisata dan Perda No. 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo. Untuk objek wisata TWI diberlakukan retribusi jasa usaha dengan objeknya, kawasan TWI dan pemanfaatan fasilitas yang ada di TWI yaitu dapat dilihat pada tabel 1.3 , tabel 1.4 dan tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.3 kategori pengunjung dan biaya masuk / orang di kawasan Taman Wisata Iman Sitinjo.

No	Kategori pengunjung	Biaya masuk / orang
1	Dewasa	Rp.5000
2	Anak-anak	Rp.3000
3	Pengguna kuda tunggang	Rp.5000
4	Fotografer dan VCD	Rp.5000
5	Pedagang asongan	Rp.3000
6	Sepeda dagang	Rp.4000
7	Gerobak atau sejenisnyaa	Rp.5000
8	Kendaraan roda dua / sepeda motor untuk berdagang	Rp.10.000

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2015

Tabel 1.4 Kategori Kendaraan dan Biaya Masuk / Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Biaya Masuk / Kendaraan
1	Roda Dua	Rp. 3000
2	Roda Empat	Rp. 5000
3	Roda Enam	Rp. 7000
4	Becak	Rp. 2000

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2015

Tabel 1.5 Kategori Sewa Tempat dan Biaya Sewa Di Taman Wisata Iman Sitinjo

No	Kategori Sewa Tempat	Biaya Sewa Tempat
1	Asrama	Rp. 150.000 / Kamar
2	Wc / Toilet	Rp. 2000 / Kendaraan
3	Kios	Rp. 25.000 / m^2
4	Aula	Rp. 400.000 / Hari
5	Lapangan / Pelataran	Rp. 100.000 / Unit Kegiatan
6	Kamar Penginapan	Rp. 200.000 / Malam

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2015

Berdasarkan keterangan dari retribusi di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah setempat memiliki Perda yang mengatur kepariwisataan. Perda yang dimaksud adalah Perda No. 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata dan Perda NO. 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo. Jadi dapat diketahui bahwa dasar pemungutan retribusi di kawasan TWI Sitinjo adalah Perda No. 04 Tahun 2005. Di dalam Perda tersebut diuraikan struktur dan besarnya tarif yang dikenakan kepada setiap pengunjung. Sejak diberlakukannya Perda No. 04 Tahun 2005, TWI telah memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan daerah. TWI telah berhasil menempati tiga besar sumber andalan PAD setelah rumah sakit dan transportasi wilayah, pemasukan dari TWI di tahun 2008 melampaui target yang ditetapkan.

Target pemasukan di tahun 2008 adalah sebesar Rp 375 juta, sementara realisasinya mencapai angka Rp 419.609.000,-. Berdasarkan pencapaian yang luar biasa tersebut, pihak Dinas meningkatkan target pemasukan di tahun 2009 menjadi Rp 475 juta, sedangkan realisasinya adalah Rp 382.286.000,-. Pemasukan dari TWI mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi jalan yang rusak menuju Kabupaten Dairi, yang mengakibatkan wisatawan merasa enggan untuk datang berkunjung yang dapat dilihat pada persentase sumber pendapatan asli daerah kabupaten dairi pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6 persentase sumber pendapatan asli daerah kabupaten dairi

No	URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013*
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah	3.22%	3.41%	2.92%
3	Pajak	0.62%	0.78%	0.67%
4	Retribusi	0.75%	1.23%	0.72%
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.88%	0.85%	0.87%

6	Lain-lain PAD yang sah	0.97%	0.55%	0.66%

Sumber: DIPPEKA Kab.Dairi tahun 2014

*) Data Proyeksi

Dari tabel tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa meskipun jumlah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dairi mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi dari sisi persentase kontribusinya terhadap pendapatan selalu mengalami penurunan. Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Seperti yang telah diketahui, bahwa mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, argonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang. Hal ini didukung oleh letak Indonesia

yang strategis, yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudera serta berada di bawah garis khatulistiwa sehingga Indonesia beriklim tropis, sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata.

Di samping itu, kondisi alam sangat mendukung karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan masyarakat yang pluralistik di dalamnya terkandung beraneka ragam suku, adat-istiadat, dan kebudayaan (kepercayaan, seni, moral) yang berbeda-beda serta mempunyai potensi keindahan alam yang terdapat di seluruh penjuru tanah air. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung ke Indonesia. Demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini tengah melaksanakan program pengembangan industri pariwisata. Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan dengan terdapatnya berbagai obyek wisata baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Potensi pariwisata Sumatera Utara dimana Danau Toba sebagai andalannya sudah tidak diragukan lagi. Panorama dan keindahan yang disajikan Danau Toba yang terjadi akibat letusan Gunung Toba itu, akan membuat pengunjung berdecak kagum, karena sepanjang mata memandang keindahan demi keindahan terbentang mengelilingi Danau Toba. Selain mengunjungi Danau Toba, wisatawan yang berkunjung ke Sumatra Utara dapat juga mengunjungi berbagai tujuan wisata yang terdapat di Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi di samping memiliki potensi sektor pertanian, juga memiliki potensi pariwisata yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi. Salah satu dari potensi wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Dairi adalah Objek Wisata Religi Taman Wisata Iman (TWI) Sijinjo.

Tempat ini dibangun pada akhir tahun 1990-an, yang sebelumnya merupakan areal hutan alang-alang, yang kemudian diubah menjadi tempat sakral. Lokasinya tepatnya berada di atas

tanjakan dikelilingi hutan pinus dan menjadi maskot ibukota Kabupaten Dairi, Sidikalang. Objek Wisata TWI telah diperkirakan akan berkembang menjadi salah satu sumber andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi di masa mendatang. Hal ini dapat diamati dari meningkatnya jumlah pendapatan daerah sejak dimulainya pengelolaan yang terkontrol oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mempromosikan dan memperkenalkan Objek Wisata TWI ini kepada umum, baik melalui media massa maupun elektronik. Namun langkah promosi tidak cukup untuk mencapai cita-cita tersebut.

Sebagai penyokong PAD untuk Kabupaten Dairi, Pemerintah Daerah akan tetap mengadakan pembangunan-pembangunan untuk penyempurnaan Taman Wisata Iman Sitinjo, termasuk pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan pada bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan baik karena faktor manusia maupun faktor alam atau usia. Keberadaan Objek Wisata TWI ini akan kurang berdaya guna apabila Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo sehingga pada akhirnya dapat diandalkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti secara khusus ingin menjawab permasalahan yaitu **“Bagaimana Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada peranan sektor pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan / sumbangan pemikiran bagi Pemerintah daerah setempat terutama dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Dairi.
3. Manfaat subjektif, yaitu sebagai suatu tahap pelatihan dan pengembangan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “*pari*” yang artinya penuh, seluruh, atau semua, dan kata “*wisata*” yang berarti perjalanan. Kata pariwisata dapat diartikan perjalanan penuh, mulai dari berangkat dari suatu tempat, ke satu atau beberapa tempat lain dan singgah, kemudian kembali ke tempat semula.¹

Pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya.²

Dari pengertian pariwisata di atas, dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang mengeluarkan biaya. Biaya-biaya dimaksud antara lain biaya konsumsi, biaya menginap,

¹Mudrajad Kuncoro, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Edisi-1, Cetakan Kelima, Jakarta : Erlangga, 2004, hal.295

²Janianton Damanik dan Helmut F.Weber, **Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi**. Edisi. 1 . - Yogyakarta: Andi,2006. Hal.1

biaya transportasi dan lain-lain. Berkaitan dengan itulah, maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak secara langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti hotel atau losmen, rumah makan, sarana angkutan atau travel biro, dan berbagai jenis hiburan yang lain. Dengan adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan wisatawan ini, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak tidak langsung adalah sebagai pemicu perkembangan bidang-bidang lainnya seperti pembangunan daerah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah, industri, dan, pemasaran dan juga produk industri pariwisata dan lain-lain.

Pemasaran Pariwisata adalah usaha yang dilakukan suatu Organisasi pariwisata daerah (OPD) untuk menarik wisatawan (wisman dan wisnus) lebih banyak datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan dollar atau rupiahnya OPD yang dikunjungi. Produk industri pariwisata adalah semua bentuk pelayanan yang dinikmati wisatawan, semenjak ia meninggalkan tempat dimana ia biasa berdiam, selama berada didaerah tujuan wisata yang dikunjungi, hingga ia kembali pulang ke tempat asalnya semula.³

Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri

³Oka A. Yoeti, **Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata**. Edisi 1 Jakarta: Pradnya Paramita. 2002. hal. 2-3.

pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya. Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara;
- 2) Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
- 3) Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat;
- 4) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara;
- 5) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan;
- 6) Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 7) Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

- 1) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- 2) Memupuk rasa cinta tanah air;
- 3) Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- 4) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 5) Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Kepariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dampak ekonomi dari pariwisata menjelaskan macam-macam dampak dari pariwisata yang dimiliki masyarakat. Ada dua macam dampak. Pertama, wisatawan tidak memberikan keuntungan dalam jumlah yang banyak. Kedua, Permintaan yang tinggi dalam suatu musim (musiman). Ini berarti bahwa dalam

beberapa bulan ada aktifitas yang besar sementara dalam bulan-bulan yang lain ada pergerakan yang kecil dalam berbisnis.⁴

2.1.1 Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik adalah:

- 1) Wisatawan; adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan.

Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.

- 2) Industri Pariwisata / Penyedia Jasa; adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan utama, yaitu:

- a. Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.

- b. Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.

- 3) Pendukung Jasa Wisata; adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk

⁴Happy Marpaung Dan Herman Bahar. Pengantar Pariwisata, Cetakan ke-1, Bandung: Alfabeta. 2002. Hal.

itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.

- 4) Pemerintah; sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing-masing.
- 5) Masyarakat Lokal; adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat; merupakan organisasi non-pemerintah yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk di bidang pariwisata, seperti proyek WWF untuk perlindungan Orang Utan di Kawasan Bahorok Sumatera Utara atau di Tanjung Putting Kalimantan Selatan, Kelompok Pecinta Alam, Walhi, dan lain-lain.

2.2 Objek Wisata

2.2.1 Pengertian Objek Wisata

Objek Wisata atau “*tourist attraction*” adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam Ilmu Kepariwisata, Objek Wisata atau lazim disebut Atraksi merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 5, Objek Wisata atau disebut Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

2.2.2 Jenis Objek Wisata

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, maka muncullah bermacam-macam objek wisata yang lama-kelamaan mempunyai cirinya tersendiri. Perkembangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang saat ini melakukan perjalanan wisata berdasarkan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Di bawah ini diuraikan mengenai beberapa jenis objek wisata yang dikelompokkan berdasarkan alasan atau motivasi serta tujuan wisatawan dalam melakukan suatu perjalanan wisata, antara lain:

1) Objek Wisata Budaya

Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang, dengan jalan mengadakan kunjungan atau melakukan peninjauan ke tempat lain, untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya, dan seni hidup mereka.

2) Objek Wisata Kesehatan

Perjalanan seorang wisatawan ke objek wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan kesehatannya dan untuk beristirahat.

3) Objek Wisata Olahraga

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke objek wisata ini mempunyai tujuan untuk berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.

4) Objek Wisata Komersial

Perjalanan yang dilakukan ke objek wisata ini dengan tujuan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial.

5) Objek Wisata Politik

Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik.

6) Objek Wisata Pilgrim

Perjalanan wisata ke tempat ini sering dihubungkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan wisatawan, dan biasanya mempunyai tujuan yang dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.

7) Objek Wisata Bahari

Perjalanan ke objek wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, atau berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air.

Objek Wisata atau Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik bagi orang-orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, yang terdiri dari:

1. Objek Wisata alam, meliputi;
 - a. Pantai, merupakan salah satu objek dan daya tarik wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas seperti berjemur di terik matahari, berenang, naik perahu, berfoto, ski air, dan lain-lain,
 - b. Pegunungan, berhubungan dengan kegiatan menikmati pemandangan, mendaki, berkemah dan berfoto. Jenis objek wisata ini termasuk gunung berapi dan bukit-bukit dengan keunikan tertentu,
 - c. Daerah Liar dan terpencil, daerah ini sering disebut sebagai *Primitive Areas*, di mana pengunjung mencari ketenangan, lingkungan alami dengan pembangunan yang terbatas serta masyarakat tradisional, Taman dan Daerah Konservasi, berhubungan dengan flora dan fauna antara lain taman safari, kebun binatang, aquarium, dan *botanic garden*.

Keberadaan objek dan daya tarik wisata ini dapat juga dijadikan sebagai tempat pengembangbiakan atau penakaran bagi flora dan fauna yang langka.

2. Objek Wisata Sosial Budaya, meliputi;
 - a. Museum dan fasilitas budaya lainnya, berhubungan dengan aspek alam dan aspek kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum ini berupa museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan, teknologi dan industri, dan lain-lain,

- b. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, berupa monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lain seperti bangunan-bangunan kuno,
- c. Pola kehidupan dan tradisi, termasuk adat istiadat, pakaian, upacara, dan kepercayaan dari suatu suku bangsa tertentu,
- d. Wisata keagamaan, etnis dan nostalgia, etar kaitannya dengan wisatawan atau pengunjung yang memiliki latar belakang kebudayaan, agama, etnis dan sejarah yang sama, atau hal-hal yang pernah berhubungan dengan masa lalunya.

Objek pariwisata dan segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama mengapa seseorang datang berkunjung pada suatu tempat. Oleh karena itu, keaslian dari objek dan atraksi yang ditampilkan harus dipertahankan sehingga wisatawan merasa betah di tempat tersebut.

2.2.3 Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan maju atau pembangunan secara bertahap, teratur dan berkelanjutan, yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan juga dapat dinilai sebagai respon terhadap perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di dalam mengupayakan pengembangan, perencanaan yang baik menjadi tindakan yang mutlak dilakukan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan suatu strategi pengembangan yang terintegrasi, sehingga sasaran yang akan dituju tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan dalam hal ini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan Obyek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi.

Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Pengembangan kepariwisataan dilandaskan atas usaha-usaha sebagai berikut:

1. Memelihara dan membina keindahan alam dan kekayaan serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan,
2. Menyediakan dan membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, *entertainment*, dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan termasuk pendidikan pegawai,
3. Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam dan di luar negeri,
4. Mengusahakan kelancaran formalitas perjalanan dan lalu lintas para wisatawan dan dengan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya,
5. Mengerahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran arus wisatawan.

2.3 Keuangan Daerah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Menurut Munir Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas

beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadaan Keuangan Daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Posisi Keuangan Daerah sangat penting karena Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dilanjutkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 No. 6 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali

sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang terdiri dari hasil Pajak, Retribusi, hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil, pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain. PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.⁵

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menghimpun sumber-sumber dana dan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Landasan hukum penerimaan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 158, yang menjelaskan bahwa:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

⁵ Wijaya, H.A.W. **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom**, Ed. 1,-5-Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hal. 110

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 7 dijabarkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor / ekspor.

Apabila suatu daerah telah berhasil dalam menghimpun dana dari potensi daerahnya, hal ini juga dapat menjadi petunjuk kemandirian daerah tersebut dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi pemerintah pusat.

2.4.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Jenis-jenis Pajak Kabupaten / Kota menurut Undang-Undang tersebut adalah:

⁶Ahmad Yani. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hal.45

- a. Pajak Hotel; adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran; adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan; adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame; adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan; adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir; adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah; adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet; adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

2.4.2 Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yani Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun yang menjadi objek dan golongan retribusi menurut UU No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jasa Umum; digolongkan Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan Daerah dan masyarakat sekitar yang berkunjung ke Taman Wisata Iman Sitingo dan kemandirian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis-jenisnya adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 2. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jasa Usaha; digolongkan Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenisnya adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu; digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu, adalah adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis - jenisnya adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4.3 Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Badan Usaha Milik Daerah juga disebut Perusahaan Milik Daerah atau Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (UU No.17 Tahun 2003 pasal 1). Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemerintah Daerah yang didirikan untuk menghasilkan laba sebagai pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Dasar pendirian Perusahaan Daerah adalah UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah menurut Undang-undang tersebut adalah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

BUMD mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah.

Menurut Baratakusumah dan Solihin, jenis-jenis BUMD yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Penyediaan Air Minum;
- 2) Pengelolaan Persampahan;
- 3) Pengelolaan Air Kotor;
- 4) Rumah Pemotongan Hewan;
- 5) Pengelolaan Pasar;
- 6) Pengelolaan Objek Wisata;
- 7) Pengelolaan Sarana Pariwisata;
- 8) Perbankan dan Perkreditan;
- 9) Penyediaan Perumahan dan Permukiman;
- 10) Penyediaan Transportasi;
- 11) Industri lainnya;
- 12) Jasa lainnya.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah hasil penjualan aset tetap daerah, bunga simpanan dan giro, penerimaan dari denda kontraktor dan berbagai penerimaan kecil-kecil

seperti hasil penjualan alat bekas dan bahan sisa. Namun walaupun demikian, sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah. Pemerintah daerah sangat dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mencari potensi yang ada seoptimal mungkin agar dapat terus meningkatkan jumlah penerimaan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberi masukan positif dan negatif bagi penulis berdasarkan bidang yang di bahas di masing-masing jurnal, adapun rincian sebagai berikut :

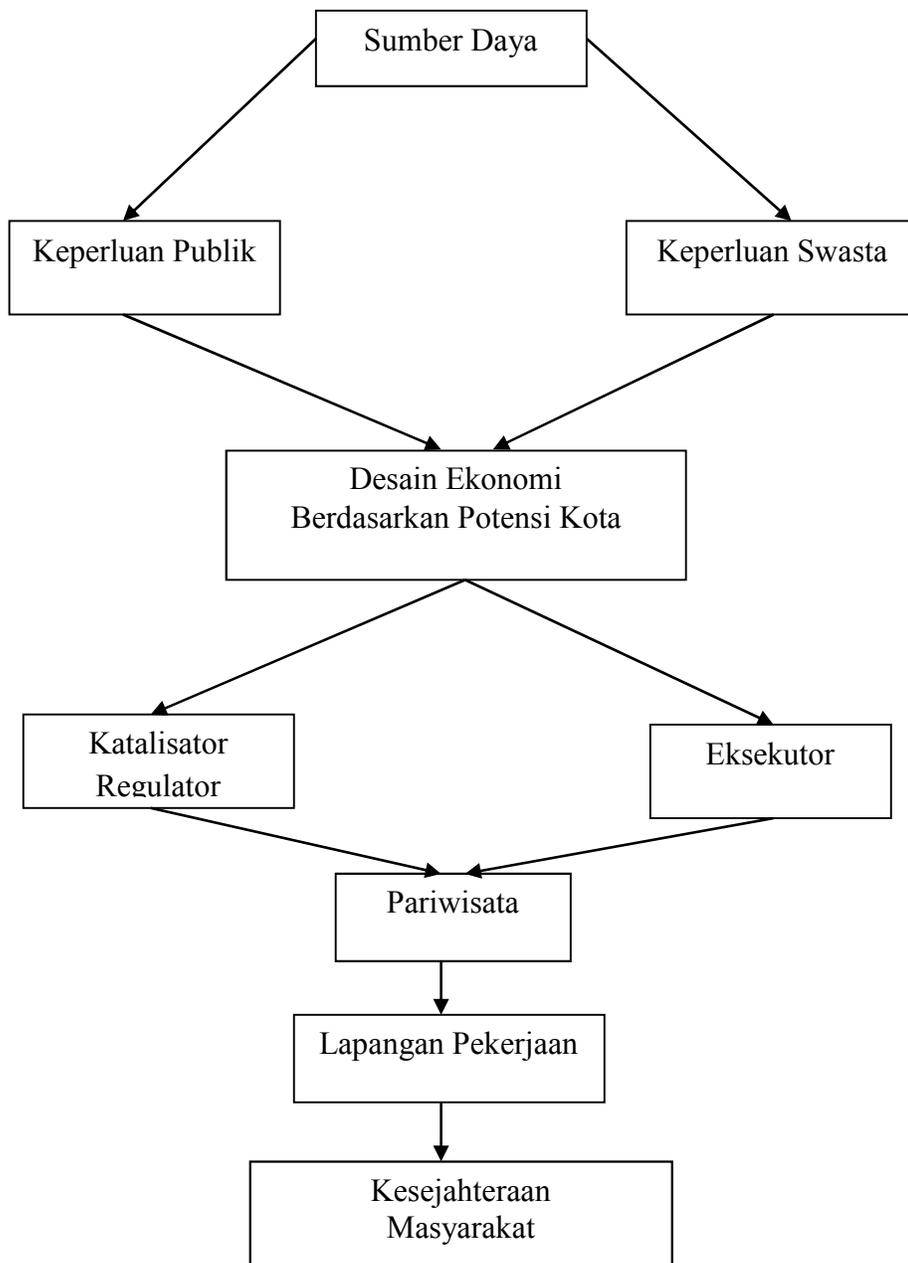
1. Widiyanto (2008), Penelitian yang berjudul Pengembangan Pariwisata Pedesaan, dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil yang didapatkan dari penelitian bahwa pengembangan pariwisata pedesaan di desa wisata Ketingan mengandalkan daya tarik alam, yaitu habitat burung. Strategi yang akan dikembangkan adalah meningkatkan pemasaran, kualitas SDM, kualitas pelayanan, memelihara mutu dari apa yang menarik dan ditawarkan dari obyek tersebut.
2. Hastuti (2005), Penelitian yang berjudul Analisis Potensi Wisata Alam di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Gunung Kidul, memiliki tujuan potensi wisata daerah pantai dan faktor pembeda kunjungan wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan analisis data sekunder dengan observasi dan didapat hasil:
 - 1) Daerah penelitian mempunyai tiga potensi yaitu tinggi, sedang dan rendah.
 - 2) Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan kunjungan wisata adalah industri pariwisata dan sarana pengunjung.
3. Kesumawardhana (2004), Penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kopeng, dengan menggunakan SWOT Analysis menemukan bahwa Kawasan Wisata Kopeng, merupakan potensi wisata tinggi yang menawarkan beragam aktivitas ekowisata

namun memiliki kelemahan yaitu pangsa pasar yang masih rendah akibat kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Jadi dari Penelitian terdahulu diatas tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap sumber dapat memberikan masukan bagi penulis untuk bisa, atau menganalisis hasil penelitian pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di dalam lapangan pekerjaan di kota Batu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan diiringi dengan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo berhasil dalam rangka meningkatkan PAD Di Kabupaten Dairi. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan peningkatan angka pemasukan bagi daerah sejak diberlakukannya pengelolaan yang terkontrol oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. TWI Sitinjo merupakan salah satu dari tiga (3) kelompok besar sumber pemasukan bagi Kabupaten Dairi.

2.6. Kerangka Pemikiran



Jadi kerangka pikir di atas tersebut menerangkan bahwa, Sumber daya di bagi menjadi dua yaitu keperluan public dan keperluan swasta, dan akan di olah berdasarkan potensi kota yang di bantu oleh katalisator regulator atau dalam artian sebagai alat pemikir atau penemu baru yang mampu menciptakan kemajuan wisata dan eksekutor yaitu orang atau pihak yang mengambil alih kebijakan wisata tersebut, yang di terangkan dalam kerangka pikir tersebut, yaitu dampak pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor lapangan pekerjaan tersebut sehingga hasil akhir diperoleh bagaimana kesejahteraan masyarakat setelah terciptanya lapangan pekerjaan.

2.7. Hipotesis Penelitian

Menurut Sumadi Suryabrata, “hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris”.⁷Dengan demikian kebenaran hipotesis masih perlu diuji melalui analisis data empiris.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu dari retribusi, pendapatan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah pengunjung yang berkunjung ke Objek Wisata Iman (TWI) Sitinjo yang setiap tahunnya meningkat dan memberikan pengaruh positif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dairi.

⁷Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Ed. 1- 19, Cetakan Ke-20, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Taman wisata iman sitinjo Kabupaten Dairi, dengan menganalisis pengembangan objek wisata taman wisata iman sitinjo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dan pengembangan pembangunan di Kabupaten Dairi.

3.2. Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pengunjung Objek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo dengan jumlah yang tidak diketahui secara pasti. Tidak diketahui secara pasti karena pengunjung yang datang setiap hari berbeda jumlahnya sehingga tidak bisa diprediksikan berapa orang yang akan berkunjung.

3.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa populasi yang ada tidak diketahui secara pasti jumlahnya sehingga menggunakan *Insidental random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan kepada siapa saja yang kebetulan ada atau teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data dan Siapa saja disini ditujukan kepada pengunjung yang sedang berekreasi ke objek wisata Taman Wisata Iman Sitingo. Jumlah responden dibatasi 110 orang dengan rincian 100 orang pengunjung, ditambah dengan 10 orang *Key Person*, yaitu 10 orang pengelola atau karyawan yang bekerja dan dianggap mengetahui betul kondisi objek wisata Taman Wisata Iman Sitingo. Untuk mengetahui besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan rumus pendekatan slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah ukuran populasi

e : persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih ditolerir (ditetapkan 10%)

misalnya, jumlah populasinya 13502, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 10%, maka

jumlah sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= \frac{13502}{1 + 13502 (10\%)^2}$$

$$= \frac{13502}{136.02}$$

$$= 99,26$$

$$= 100$$

Dari data mengenai perhitungan sampel diatas terdapat 100 sampel jadi responden dalam penelitian ini adalah 100 responden.

3.2.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

3.3 Obyek Penelitian

Penetapan obyek penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu maka obyek penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini obyek yang peneliti pilih adalah wilayah Kabupaten Dairi dengan obyek penelitian di Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadaan objek wisata serta faktor pendukung dan penghambat. Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pengembangan obyek wisata Dengan Indikator :

1) Faktor pendorong pengembangan obyek wisata Taman Wisata Iman Sitinjo

Faktor pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. Dalam usaha pembangunan daerah menjadi daerah tujuan pariwisata perlu diperlukan daya tarik dari obyek wisata. Dalam usahanya tersebut diperlukan suatu pemasaran untuk mempromosikan dan mengenalkan potensi wisata Taman Wisata Iman Sitinjo yang dimilikinya. Faktor pendorong pada Obyek Wisata antara lain panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli, Sumber air yang melimpah, Kondisi keamanan yang baik, Suasana obyek wisata yang memberikan kenyamanan, Jarak tempuh obyek wisata yang dekat dengan kota.

2) Faktor penghambat pengembangan obyek wisata Taman Wisata Iman Sitinjo Pengembangan obyek wisata pastilah tidak lepas dengan adanya faktor-faktor penghambat. Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata obyek wisata yang ada di Kabupaten Dairi adalah belum tertatanya dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten:

a. Faktor penghambat pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo antara promosi obyek wisata yang kurang baik, program pengembangan obyek wisata yang masih sederhana, keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana obyek wisata, keadaan jalan yang kurang baik, kurangnya tenaga professional dalam pengelola obyek wisata.

b. Strategi pengembangan obyek wisata

Strategi pengembangan pariwisata merupakan berbagai gambaran strategi untuk pengembangan potensi pariwisata yang telah diterapkan di Kabupaten Dairi. Strategi tersebut terbentuk dengan memanfaatkan sumber daya, dana/anggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan pengembangan potensi pariwisata.

c. PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi
2. Metode Komunikasi Langsung
3. Kuesioner

3.6. Sumber data

Pada bab ini akan disajikan data dan informasi yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang mendukung data primer. Adapun permasalahan utama yang disajikan dalam bab ini yaitu Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Dalam proses pengumpulan data guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu; mencari informasi dan data-data tentang kepariwisataan di Kabupaten Dairi, secara khusus tentang Objek Wisata TWI Sitinjo. Informasi

dan data-data tersebut dicari dari media dan meninjau langsung ke kawasan TWI Sitinjo. *Kedua*, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang lebih lengkap menyangkut masalah penelitian dilokasi TWI.

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dari para informan tentang Pengembangan Objek Wisata TWI Sitinjo Dalam Meningkatkan PAD Dairi. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat susunan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan masalah penelitian. Penulis juga menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tugas dan fungsi masing-masing informan. Hal ini dimaksudkan agar informan memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun berhubungan dengan Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, biasanya menggunakan statistik. Setelah data dianalisis dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasilnya diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode analisis Deskriptif untuk menjawab faktor-faktor pendorong dan penghambat pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo dan kontribusi Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo untuk PAD Kabupaten Dairi. Sedangkan untuk menjawab strategi pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo menggunakan analisis SWOT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Matriks Metode Analisis Data

No	Masalah	Metode analisis data
1	Identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman Sitinjo	Analisis Deskriptif
2	Strategi pengembangan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi dalam pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman	Analisis SWOT
3	Bagaimana kontribusi Obyek Wisata Taman Wisata Imandalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi?	Analisis Deskriptif Statistik

a. Analisis Deskriptif

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat Pengembangan Obyek Wisata Taman wisata Iman Sitinjo dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Dairi. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan /mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis. Teknik analisis

SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi institusi bersangkutan. Istilah SWOT adalah merupakan singkatan dari empat kata, yaitu: Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threat (Ancaman). Keempat unsur ini merupakan aspek penting yang perlu dibahas untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah institusi tertentu.⁸

Setelah mengumpulkan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Iman, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan informasi tersebut ke dalam rumusan strategi. Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis pengembangan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Obyek Wisata Taman Wisata Iman dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik analisis SWOT menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau tantangan yang dimiliki.

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam perusahaan, maka sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu menemukan strategi yang sangat cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perusahaan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan antara lain :

1. Kekuatan (*Strenght*), Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan dan berbeda dengan produk lain. sehingga dapat membuat lebih kuat dari para pesaingnya. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain

⁸Sjafrizal, **Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi**, Edisi 1 – 1 -, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hal. 246.

relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar.

2. Kelemahan (*Weakness*), Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan.

3. Peluang (*opportunity*), Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang.

4. Ancaman (*Treats*), Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan.

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika dapat dikatakan bahwa analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang

Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*) Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (*Weaknesses- Threats*) Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi ST, Strategi ST merupakan strategi dalam menggunakan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman. Strategi ini mempertemukan interaksi antara ancaman atau tantangan dari luar yang diidentifikasi untuk memperlunak ancaman atau tantangan tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya menjadi peluang bagi pengembangan selanjutnya. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

Strategi WT Merupakan tempat menggali berbagai kelemahan yang dihadapi Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat di dalam kawasan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan sedikit membenahi sumber daya internal yang ada. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Sebelum membuat matrik SWOT seperti diatas terlebih dahulu membuat matrik strategi internal dan eksternal. Cara-cara penentuan faktor strategi internal (IFAS) antara lain :

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan pada kolom 1.
2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan.

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing faktor dengan memberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1(poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi usaha wisata yang bersangkutan.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4 .

“Matriks Eksternal pada dasarnya adalah ringkasan dari berbagai analisis yang telah dilakukan terhadap keseluruhan faktor- faktor eksternal, khususnya lingkungan makro. Untuk keperluan ini biasanya dilakukan dengan tahapan berikut: (1) mengidentifikasi dan membuat daftar dari berbagai variabel yang hendak diperhatikan, (2) memberi bobot (weight) dari masing- masing variabel, (3) melakukan penilaian (rating) terhadap masing-masing variabel, (4) mengalikan bobot dan nilai, dan (5) menjumlah nilai tertimbang dari seluruh variabel. Dari matriks inilah profil lingkungan eksternal dapat diketahui”.⁹

Cara-cara penentuan faktor strategi eksternal (EFAS) :

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).
3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating 4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating 1)
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan kolom 4 .

3.8 Definisi Operasional

⁹ Suwarsono, **Manajemen Strategik Konsep, Alat Analisa, dan Konteks**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 1994, Hal. 57

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (dengan satuan juta rupiah).
2. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (dengan satuan juta rupiah).
3. Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerana mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan satuan juta rupiah).
4. Belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali karena aktivitas operasional pemerintah daerah yang dilakukan tidak menghasilkan laba sebagaimana aktivitas operasional suatu perusahaan (dengan satuan juta rupiah).

